

ABSTRAK

Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sebuah perguruan tinggi dengan bentuk pengolahan Satuan Kerja (satker) menguasai lahan tambak. Pengelolaan lahan tersebut direncanakan akan memberdayakan petani dalam penggarapan lahan tambak garam UTM. Oleh karena itu, perlu dikaji model akad yang tepat untuk dapat diterapkan oleh UTM dengan petani dalam pengelolaan tambak garam UTM. Apakah menggunakan akad bagi hasil ataukah akad *ijarah* (jasa) jika dikaitkan dengan status Perguruan Tinggi UTM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah UTM dengan bentuk pengelolaan satker yang mana ketentuan baik akademik maupun non akademik ditentukan oleh negara. Kewenangan untuk mengatur pendanaan UTM sudah diatur oleh negara dengan menggunakan perencanaan anggaran yang disebut dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). UTM dengan bentuk pengelolaan satker juga tidak dapat mendirikan unit usaha. Oleh karena itu, UTM tidak dapat melakukan kerjasama dengan petani menggunakan model akad bagi hasil pada kerjasama dalam penggarap lahan tambak garam miliknya. Untuk dapat melaksanakan kerjasama dengan model akad bagi hasil maka UTM harus menaikkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum (BLU) atau PTN Badan Hukum. UTM sebagai PTN satker dapat menerapkan model akad *ijarah* dalam kerjasamanya dengan petani untuk menggarap lahan miliknya. Dengan menggunakan pola upah pada hasil kerja dari petani. Dalam menerapkan model akad *ijarah* UTM harus memberikan imbal balik yang layak kepada petani yang sudah memberikan hasil kerjanya dalam menggarap lahan tambak garam milik UTM.

Kata Kunci : Akad Pengelolaan, Bagi Hasil, Lahan Tambak, Ijarah, Satker.

ABSTRACT

University of Trunojoyo Madura (UTM) is a university with the form of processing a work unit which have a salt pond. The land management is planned to empower the farmers in cultivating UTM salt pond. Therefore, it is necessary to study the right contract model to be applied by UTM with the farmers in management of UTM's salt pond. Is it use a profit sharing contract or an ijarah contract (service) if it is associated with the status of Trunojoyo Madura University. This research uses normative legal research method and uses a conceptual approach. The result of this study is Trunojoyo Madura University with a form of work unit management where both of academic and non-academic are determined by the country. The authority to regulate UTM source of fund that has been regulated by the country using a budget plan which called the Budget Implementation List (BIL). UTM with the form of work unit also can not establish a business unit. Therefore, UTM can not cooperate with the farmers using a profit sharing contract model in cooperation on cultivating their salt pond. To be able to carry out cooperation with the profit-sharing contract model, UTM must raise the status to a Public Service Agency (PSA) or State University that is legal entity. UTM as a State University in work unit can apply the ijarah contract model in collaboration with farmers to work on their land. By using the pattern of wages on the work of farmers. In applying the UTM ijarah contract model, it must provide proper compensation to farmers who have given their work result in working on UTM's salt ponds.

Keywords: Management Contract, Profit Sharing, Pond Land, Ijarah, work unit.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	4

1.5 Keaslian	4
1.6 Metode Penelitian	6
1.6.1 Jenis Penelitian	6
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KERJASAMA PENGOLAHAN	
LAHAN PADA PENDIDIKAN TINGGI	11
2.1 Pendidikan Tinggi	11
2.1.1 Pengertian Pendidikan Tinggi.....	11
2.1.2 Pengelolaan Dalam Pendidikan Tinggi	12
2.2 Keuangan Negara	14
2.2.1 Pengertian Keuangan Negara	14
2.2.2 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Negara.....	17
2.3 Kerjasama Menurut Hukum Islam	19
2.3.1 Definisi Kerjasama Dalam Hukum Islam.....	19
2.3.2 Dasar Hukum Syirkah	21
2.3.3 Rukun Syirkah	24
2.4 Ijarah	27
2.4.1 Dasar Hukum Ijarah.....	27
2.4.2 Rukun Ijarah	28
2.4.3 Macam – macam Ijarah.....	29

2.4.4 Hukum Ijarah Dalam Pekerjaan	29
BAB III ANALISIS MODEL AKAD KERJASAMA YANG TEPAT	31
ANTARA UTM DENGAN PETANI	31
3.1 Analisis Kesesuaian Penerapan Kerjasama Pada Perguruan tinggi....	31
3.1.1 Analisis Pengatura Hukum Tentang Kerjasama	31
3.1.2 Analisis Penerapan Model Akad Bagi Hasil Oleh Pengelolaan Lahan Tambak Universitas Trunojoyo Madura.....	35
3.2 Analisis Kesesuaian Penerapan Akad Ijarah Oleh Perguruan Tinggi.	48
3.2.1 Analisis Penerapan Model Akad Ijarah Oleh Pengelolaan lahan tambak Universitas Trunojoyo Madura	48
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56